

**ANALISIS PERENCANAAN ANGGARAN APBD TAHUN
2022 DI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Publik



Diajukan oleh:

M. ABY ABDILLAH

NIM. 07011382025237

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

ANALISIS PERENCANAAN ANGGARAN APBD TAHUN 2022
DI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Dijukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Mencapai
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik

Oleh:

M. ABY ABDILLAH

NIM. 07011382025237

Pembimbing Skripsi

Tanda Tangan

Tanggal

Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM
NIP. 195811191985031003



15 Maret 2024

Mengotahui,

Koran Sarjana



Dr. Muhammad Nur Hidayanto, S.SOS., MPA

NIP. 19691110194011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**ANALISIS PERENCANAAN ANGGARAN APBD TAHUN 2022
DI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

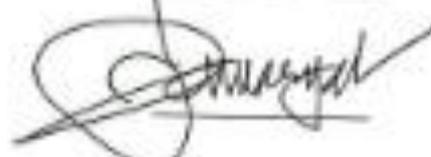
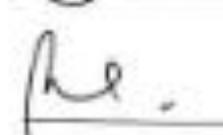
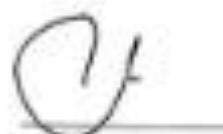
Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal Maret 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

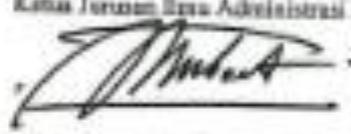
Prof. Dr. H. Slamet Widada, MS., MM

Jenaidi, S.IP., M.Si

Jasman Eko Aryansih, S.IP.,SHI.,M.Si



Mengetahui,

 <p>Deban FISIP UNSRI Prof. Dr. Alfitri, M.Si NIP. 196601221990821004</p>	<p>Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik</p>  <p>Dr. Muhammad Nur Rasyanto, S.SOS., MPA NIP. 196911101994011001</p>
--	--

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Aby Abdillah

NIM : 07011382025237

Tempat dan Tanggal Lahir : Jambi, 5 Juli 2001

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan Dengan Sungguh-Sungguh Dahwa Skripsi Yang Berjudul "Analisis Perencanaan Anggaran APBD Tahun 2022 di Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan" Ini Adalah Benar-Benar Karya Saya Sendiri Dan Saya Tidak Melakukan Penjiplakan Atau pun Pengutipan Dengan Cara Yang Tidak Sesuai Dengan Etika Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi. Apabila Dikemudian Hari, Ada Pelanggaran Yang Ditemukan Dalam Skripsi Ini Dan/ Atau Ada Pengaduan Dari Pihak Lain Terhadap Keasliannya Karya Ini, Saya Bersedia Menanggung Sanksi Yang Dijatuhkan Kepada Saya. Demikian Pernyataan Ini Dibuat Dengan Sungguh-Sungguh Tanpa Ada Pemaksaan Dari Pihak Manapun .

Yang membuat pernyataan
Palembang, Maret 2024

M. Aby Abdillah



NIM. 07011382025237

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

” Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering” -
STARWARS

Atas Ridho Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Orang tuaku tercinta, Agus Susanto, S.E dan Yuliana
- Adikku, Muhammad Aga Athalegawa
- Dosen dan Pegawai FISIP UNSRI
- Sahabat-sahabat terbaikku
- Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik
- Almameterku

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat nya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan KKA dengan judul “**Analisis Perencanaan Anggaran APBD Pada Tahun 2022**”.

Laporan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan tugas mata kuliah “Kuliah Kerja Administrasi” di Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Laporan ini telah saya susun dengan semaksimal mungkin dengan bantuan dari berbagai pihak. Maka penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Pihak-pihak tersebut antara lain:

1. ALLAH SWT, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama Skripsi hingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai Utusan Allah yang telah memberikan petunjuk dalam menjalani kehidupan.
3. Kedua Orang Tua dan Adik tercinta yang tak pernah berhenti memberikan dukungan selama perkuliahan dan mendoakan agar sukses dunia akhirat. Terima kasih atas do'a, bantuan, dan dukungannya baik yang bersifat moril maupun materil selama ini khususnya selama Proses Pembuatan Skripsi.
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
6. Bapak Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM selaku Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi
7. Bapak Ir. H. Iskandar Zulkaiman, SH, M.Si selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
8. Ibu Henny Mukolisa, SH., MH Selaku Kabag TU Biro Administrasi Pembangunan
9. Ibu Agustina, S.T, M.T., M.Sc selaku Kasubbag Administrasi Pembangunan Dekonsentrasi Dan Dana Alokasi Khusus

10. Ibu Yossy Fitria, S.Pi selaku Kepala Sub Bagian Program dan Kegiatan Pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan yang selalu membantu di Dinas Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

11. Seluruh Pegawai dan Staff Dinas Biro Administrasi Pembangunan Kota Palembang serta Semua Pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama Skripsi hingga penyelesaian Skripsi

12. Kepada Jihan Audira selaku kekasih yang sudah membantu, mensupport serta menjadi penyemangat dengan penuh kesabaran, perhatian dan pengorbanan membantu peneliti menyelesaikan laporan ini.

Karena bantuan dari pihak yang sudah penulis sebutkan tadi, maka penulis bisa menyelesaikan laporan ini dengan sebaik-baiknya. Laporan ini memang jauh dari kata sempurna, maka dari itu dengan kerendahan hati saya mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak laporan menjadi lebih baik lagi.

Palembang, Maret 2024

Penulis

ABSTRAK

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan anggaran APBD tahun 2022 di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai visi misi gubernur dan wakil gubernur terpilih masa bakti 2019-2023, yaitu Sumsel Maju untuk Semua. Dalam rangka penyelenggaraan visi misi tersebut pemerintah daerah perlu Menyusun APBD untuk memastikan ketersediaan dana tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini digunakan untuk melihat sistem perencanaan APBD tahun 2022 di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, bagaimana tahap-tahap perencanaannya hingga kendala apa saja yang terdapat Ketika merencanakan dan menyusun APBD. Penelitian ini menggunakan Teknik wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini berusaha memberikan wawasan yang mendalam mengenai perencanaan anggaran. Hasil penelitian ini penyusunan anggaran terlaksana dengan baik, namun terdapat keterlambatan dikarenakan adanya perubahan anggaran di tengah pelaksanaan.

Kata Kunci: Perencanaan, APBD, Biro Administrasi Pembangunan

Pembimbing



Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM

NIP. 195811191985031003

Palembang, Maret 2024
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.SOS., MPA

NIP 196911101994011001

ABSTRACT

ABSTRACT

This study is aimed at finding out the planning of the APBD budget for 2022 at the Development Administration Bureau of the Regional Secretariat of South Sumatra Province. The South Sumatra Provincial Government has a vision and mission for the elected governor and deputy governor for the 2019-2023 term, namely South Sumatra is Advanced for All. In order to implement the vision and mission, regional government need to prepare APBD to ensure the availability of these funds. Using a descriptive qualitative approach, this study is used to look at planning system of the 2022 APBD at Bureau of Development Administration of Secretariat, how the stages of planning to any obstacles that exist when planning and compiling APBD. This study uses interview techniques and documentation. This research seeks to provide in-depth insight into budget planning. The results of this study were well implemented, but there were delays due to changes in the budget in the middle of implementation.

Keywords: Planning, apbd, Bureau of Development Administration

Pembimbing



Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM

NIP. 195811191985031003

Palembang, Maret 2024

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.SOS., MPA

NIP 196911101994011001

DAFTAR ISI

COVER4.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	14
1.1 Latar Belakang	14
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.4.1. Manfaat Teoritis	4
1.4.2. Manfaat Praktis	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Perencanaan.....	5
2.2 Anggaran.....	7
2.2.1 Pengertian Anggaran	7
2.2.2 Tujuan Anggaran	8

2.2.3 Faktor dan Pertimbangan dalam Anggaran	8
2.2.4 Jenis-Jenis Anggaran	9
2.3. Perencanaan Anggaran	10
2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	12
2.4.1 Alur Perencanaan dan Penganggaran APBD	12
2.4 Penelitian Terdahulu	17
2.5 Kerangka Berpikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	25
3.3 Fokus Penelitian	26
3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan	26
3.4.1 Jenis Data	26
3.4.2 Sumber Data	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data	27
3.6 Teknik Analisis Data	29
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian	31
4.1.1 Sejarah Singkat Biro Administrasi Pembangunan	31
4.2 Visi dan Misi Instansi	32
4.2.1 Visi Instansi	32
4.2.2 Misi Instansi	32
4.3 Struktur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan	33

4.4 Tugas Pokok Fungsi (TUPOKSI) Pegawai	35
4.5 Hasil Penelitian	37
4.5.1 Perencanaan anggaran APBD tahun 2022 pada Biro Administrasi Pembangunan SETDA Sumatera Selatan.....	37
4.5.2 Kendala/Permasalahan Penyusunan Perencanaan Anggaran APBD tahun 2022 pada Biro Administrasi Pembangunan Sumatera Selatan	43
BAB V KESIMPULAN	45
5.1 Kesimpulan	45
5.2 Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	47
LAMPIRAN.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Penelitian
Terdahulu.....		Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....		Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.1 Perencanaan Program/Kegiatan di Biro Administrasi Pembangunan SETDA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.....		Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Sumatera Selatan atau sering disebut SUMSEL, atau Pemprov Sumsel, menetapkan visinya dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai, menganalisis isu-isu strategis, dan berbicara tentang visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2019-2023. Visi ini sejalan dengan prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang mempertimbangkan tujuan nasional, prioritas pembangunan, dan tujuan pembangunan millennium. Dalam RPJMD Pemerintah Sumatera Selatan tahun 2019 hingga 2023, visi pembangunan adalah “Sumsel Maju Untuk Semua”. Visi ini kemudian diuraikan dalam lima misi, yang mencakup pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), tata Kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kehidupan beragama, seni, dan budaya.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Daerah perlu membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memastikan bahwa dana tersedia untuk daerah tersebut. Proses perencanaan dan penyusunan APBD ini dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah, termasuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penyusunan draf Kebijakan Umum Anggaran, penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), penyusunan draf Peraturan Daerah (Perda) APBD, dan penetapan APBD.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, proses penetapan mengenai rincian APBD diatur dalam Pasal 117. Pasal ini menegaskan bahwa Kepala Daerah bertanggung jawab untuk menetapkan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala daerah (Perkada) mengenai penjabaran APBD. Proses ini harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. Setelah itu, Kepala Daerah harus segera menyampaikan Perda

tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD kepada Menteri yang bertanggung jawab atas urusan daerah provinsi serta gubernur sebagai perwakilan Pemerintah Pusat bagi daerah Kabupaten/Kota, selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari setelah Perda dan Perkada tersebut ditetapkan. Namun, jika Kepala Daerah tidak dapat melaksanakan tugasnya, pejabat yang berwenang dapat menetapkan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD.

Penyusunan Rencana Strategis merupakan bagian integral dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Kemudian, proses ini mengalami penyempurnaan atau modifikasi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, peraturan ini menjelaskan proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Ini menjelaskan bagaimana evaluasi rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan Rencana Kerja pemerintah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dilakukan. Penetapan aturan tersebut diumumkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 25 September 2017.

Peraturan Menteri tersebut menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 yang berkaitan dengan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Langkah-langkah, prosedur penyusunan, pengawasan, dan penilaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, diatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta prosedur untuk mengubah Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Jangka Menengah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang berjangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang berlangsung selama 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun.

Penyusunan Rencana Startegis adalah bagian yang wajib dilakukan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki pertanggungjawaban dan kewajiban untuk merancang rencana yang strategis sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000.

Perencanaan memiliki peranan yang signifikan dalam pelaksanaan anggaran karena tidak semua anggaran yang diajukan akan disetujui. Hal ini dapat mengakibatkan pengajuan anggaran yang melebihi kebutuhan sebenarnya, tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang sesungguhnya di lapangan atau tingkat kemudahan implementasinya. Anggaran digunakan sebagai alat perencanaan untuk menetapkan sasaran yang harus dicapai oleh pemerintah dalam pelaporan kegiatan keuangan mereka. Evaluasi ini penting untuk menilai sejauh mana realisasi anggaran APBN mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penerapan anggaran dan evaluasi kinerja juga memiliki dampak pada pencapaian anggaran itu sendiri. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dirancang dengan pendekatan kinerja yang menekankan pencapaian *output* dari alokasi biaya yang telah ditetapkan. Tujuan dari APBD adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, memajukan ekonomi daerah, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menurut UU Nomor 33 tahun 2004, yaitu suatu perencanaan keuangan tahunan untuk daerah yang dibuat berdasarkan peraturan daerah yang relevan. Menurut Permendagri Nomor 11 Tahun 2006 menyatakan bahwa APBD digunakan sebagai dasar untuk pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran, yang dimulai 1 Januari hingga 31 Desember. Setiap penerimaan dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD, dan penerimaan dan pengeluaran ini secara khusus mencakup pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Namun, APBD tidak memasukkan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pembantuan atau dekonsentrasi.

Setelah berdiskusi dengan informan, Yossy Fitria, S.Pi., Kepala Sub Bagian program dan Kegiatan pada Biro Administrasi Pembangunan, ditemukan masalah terkait keterlambatan pengiriman rencana anggaran pada tahun 2022. Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk Menyusun laporan akhir dengan judul **“Analisis Perencanaan Anggaran APBD Tahun 2022 di Biro Administrasi Pembangunan SETDA Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, perumusan masalahnya adalah tentang bagaimana proses perencanaan anggaran APBD tahun 2022 di Biro Administrasi Pembangunan SETDA Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami proses perencanaan anggaran APBD tahun 2022 di Biro Administrasi Pembangunan SETDA Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Temuan yang diperoleh dalam analisis program atau kebijakan serta evaluasi kualitas pelayanan, terutama dalam analisis perencanaan APBD dan sanksi administrative, serta pengembangan teori-teori yang ada, terutama dalam bidang Ilmu Administrasi Publik. Harapannya, penelitian dapat memberikan kontribusi berpikir dan menjadi referensi terkait perencanaan APBD tahun 2022 di Biro Administrasi Pembangunan SETDA Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini secara praktis akanmemeberikan manfaat dan kontribusi pemikiran kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait perencanaan APBD tahun 2022 di Biro Administrasi Pembangunan Sumatera Selatan
- b. Selain itu, diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi pembaca dan peneliti lain sebagai referensi dalam penulisan karya ilmiah atau penelitian di bidang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. 2022. Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pemerintah Kota Palembang. Sumatera Selatan. 793 hal
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (2019). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023. Sumatera Selatan: Pemprov Sumatera Selatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.